

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN PASCA PEMEKARAN



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

KETUT WAHYU DHYATMIKA
NIM. C2B008085

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ketut Wahyu Dhyatmika
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008085
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP
Judul Skripsi : ANALISIS KETIMPANGAN
PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN
PASCA PEMEKARAN

Dosen Pembimbing : Hastarini Dwi Atmanti, SE., M.Si

Semarang, 27 Februari 2013
Dosen Pembimbing,

(Hastarini Dwi Atmanti, SE., M.Si)
NIP. 197508212002122001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ketut Wahyu Dhyatmika
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008085
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP
Judul Skripsi : Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi
Banten Pasca Pemekaran

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2013

Tim Penguji :

1. Hastarini Dwi Atmanti, SE., M.Si (.....)
2. Prof. Dr. H. Miyasto, SU (.....)
3. Drs. Bagio Mudakir, MSP (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, M.Com., Ph.D)
NIP. 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Ketut Wahyu Dhyatmika menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Banten Pasca Pemekaran, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis lainnya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 Februari 2013
Yang membuat pernyataan,

(Ketut Wahyu Dhyatmika)
NIM. C2B008085

ABSTRACT

This research aims to 1) analyze the magnitude of the inequality of development that happens in Banten Province after the expansion region; 2) classify the regency/municipalities based on Klassen typology; 3) analyze the influence of foreign direct investment (FDI), government expenditure (GE), and unemployment rate (UE) of inequality of development. In 1955, Kuznet described the relationship between growth and inequality which forms the U-inverted curve. Post expansion region in 2000, economic growth banten province tended to increase but followed with inequality will also increase.

This research use 1) williamson Index for measuring inter-regional development inequality; 2) Klassen typology for classifying each region based on per capita income and economic growth; 3) Analysis of panel data by method fixed effect model (FEM) with the time research 2001-2011. This research use software Eviews 6.

The results showed that the level of inequality in Banten Province development tend to increase. Based on klassen Typology, tangerang and cilegon municipality is at a group of regional forward and fast growing, tangerang to a group of developing areas quickly and other areas located in the prologue and the left. Panel data analysis results with the method of FEM, foreign direct investment (FDI) and government expenditure affect positif and negative against inequality, while the unemployment rate variable has no effect against the inequality of development in Banten Province after the expansion region.

Keyword: inequality of development, economic growth, Williamson Index, Klassen typology, foreign direct investment (FDI), government expenditure, unemployment rate, FEM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis besarnya ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah; 2) mengklasifikasikan kabupaten/kota berdasarkan tipologi klassen; 3) menganalisis pengaruh penanaman modal asing (PMA), pengeluaran pemerintah (GE), dan tingkat pengangguran (UE) terhadap ketimpangan pembangunan. Tahun 1955 Kuznet menggambarkan hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan yang membentuk kurva “U-terbalik”. Pasca pemekaran wilayah tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten cenderung meningkat akan tetapi diikuti dengan ketimpangan yang juga meningkat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 1) Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah, 2) Tipologi Klassen untuk mengelompokkan tiap-tiap daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, 3) Analisis panel data dengan metode Fixed Effect Model (FEM) dengan waktu penelitian tahun 2001-2011. Penelitian ini menggunakan software Eviews 6.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten cenderung meningkat. Berdasarkan tipologi klassen, Kota Tangerang dan Cilegon berada pada kelompok daerah maju dan cepat berkembang, Kabupaten Tangerang pada kelompok daerah berkembang cepat dan daerah lainnya berada pada kategori daerah tertinggal. Hasil analisis data panel dengan metode FEM, penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif dan pengeluaran pemerintah (GE) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, sedangkan variabel tingkat pengangguran (UE) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah.

Kata kunci: ketimpangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, indeks Williamson, tipologi klassen, PMA, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran, FEM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan anugrah kepada penulis. Tiada daya dan kekuatan selain dari pada-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Banten Pasca Pemekaran”. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penelitian ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua, I Nyoman Sura Mataram, BBA dan Melan Kerlina, yang selalu mendoakan, mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis tanpa kenal lelah.
2. Putu Eko Prasetyo, SE., MPP dan Made Arie Setiawati (Kakak) yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis.
3. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D.
4. Ibu Hastarini Dwi Atmanti, SE., M.Si selaku dosen pembimbing atas segala kesabaran, arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si selaku dosen wali atas segala arahnya selama penulis menempuh pendidikan.
6. Ibu Evi Yulia Purwanti, SE., M.Si selaku sekretaris jurusan IESP dan Koordinator IESP Reguler II yang selalu membimbing dan membantu penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh dosen Jurusan IESP yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pemahaman selama masa studi.
8. Saudara dan sahabat seperjuangan IESP 2008 (Adelino, Andhika “Badik”, Berlian, Firza”Bawang”, Iqbal “Balqi”, Gerhard, Isty, Leo “Gendru”, Haniz, Andi, Hera, Muji, Philip, Tito, Rekha, Ochi, Ryan, Wanti, Yanuar) yang selalu bersama dan mewarnai kehidupan penulis selama menempuh studi.
9. Kawan Ideologi dan teman berfikir Mudas Perdana dan Prabowo Dwi Kristanto yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama penulis.
10. Teman-teman organisasi kemahasiswaan HMJ IESP Reguler II Periode 2010, KB HMJ 2010, dan BEM FEB UNDIP periode 2011.
11. Teman bermain riski, iis, tito, muji, bawang, ryan, janwar, adam, ari, mila, wibi, tiko, dll yang selalu meluangkan waktu dan menghibur penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	17
1.3 Tujuan dan Kegunaan	18
1.4 Sistematika Penulisan	19
BAB II. TELAAH PUSTAKA	21
2.1 Landasan Teori	21
2.1.1 Pembangunan Ekonomi	21
2.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah	22
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	23
2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	26

	Halaman
2.1.5 Ketimpangan Pembangunan	28
2.1.6 Ukuran Ketimpangan Pembangunan	31
2.1.7 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan	33
2.1.8 Tipologi Daerah	36
2.1.9 Penanaman Modal Asing (PMA)	38
2.1.10 Hubungan Penanaman Modal Asing dengan Ketimpangan ...	40
2.1.11 Pengangguran	41
2.1.12 Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Ketimpangan	46
2.1.13 Pengeluaran Pemerintah	46
2.1.14 Pengeluaran Pemerintah Daerah	50
2.1.15 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan	51
2.1.16 Pemekaran Wilayah	52
2.2 Penelitian Terdahulu	55
2.3 Kerangka Pemikiran	60
2.4 Hipotesis	62
BAB III. METODE PENELITIAN	63
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Variabel	63
3.1.1 Variabel Penelitian	63
3.1.2 Definisi Operasional	63
3.2 Jenis dan Sumber Data	65
3.3 Metode Pengumpulan Data	66
3.4 Metode Analisis	66

	Halaman
3.4.1 Analisis Ketimpangan (Indeks Williamson)	66
3.4.2 Tipologi Klassen	67
3.4.3 Metode Data Panel	69
3.4.3.1 Model Penelitian	70
3.4.3.2 Regresi Model Data Panel Pendekatan Fixed Effect	71
3.4.4 Uji Asumsi Klasik	72
3.4.4.1 Deteksi Multikolinearitas	74
3.4.4.2 Deteksi Heteroskedastisitas	75
3.4.4.3 Deteksi Autokorelasi	75
3.4.5 Pengujian Statistik	76
3.4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)	76
3.4.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	77
3.4.5.3 Uji Signifikansi Individual (Uji t)	78
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	80
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	80
4.1.1 Kondisi Geografis	80
4.1.2 Kondisi Penduduk	81
4.1.3 Kondisi Perekonomian	83
4.1.4 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing	89
4.1.5 Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pemerintah	90
4.1.6 Perkembangan Tingkat Pengangguran	92
4.2 Analisis Data	93

	Halaman
4.2.1 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah	93
4.2.2 Klasifikasi Daerah (Tipologi Klassen)	95
4.2.3 Analisis Regresi Data Panel	98
4.2.3.1 Hasil Regresi Model FEM	98
4.2.3.2 Uji Asumsi Klasik	99
4.2.3.2.1 Deteksi Multikolinearitas	99
4.2.3.2.2 Deteksi Heteroskedastisitas	100
4.2.3.2.3 Deteksi Autokorelasi	101
4.2.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)	103
4.2.3.4 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	104
4.2.3.5 Uji Signifikansi Individual (Uji t)	104
4.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan	109
4.3.1 Dummy	107
4.3.2 Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Ketimpangan	108
4.3.2 Pengeluaran Pemerintah (GE) Terhadap Ketimpangan	109
4.3.3 Tingkat Pengangguran (UE) Terhadap Ketimpangan	110
BAB V. PENUTUP	111
5.1 Simpulan	111
5.2 Keterbatasan	114
5.3 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Indonesia ADHK 2000 Tahun 2001 – 2011	3
Tabel 1.2 PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten ADHK 2000 Tahun 2001-2011 (Miliar Rupiah)	10
Tabel 1.3 Perkembangan PMA Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten	14
Tabel 1.4 Tingkat Pengangguran Provinsi Banten Tahun 2001-2011.....	15
Tabel 1.5 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Banten	16
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	55
Tabel 3.1 Klasifikasi Kabupaten/Kota Menurut Tipologi Klassen	68
Tabel 4.1 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 1990 – 2011	82
Tabel 4.2 PDRB, Kontribusi dan Pertumbuhan ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001 – 2011	83
Tabel 4.3 Perkembangan Realisasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2001 – 2011	89
Tabel 4.4 Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2001 – 2011	91
Tabel 4.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2001 – 2011	92

Tabel 4.6	Tingkat Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran Tahun 2001 – 2011	94
Tabel 4.7	Klasifikasi Kabupaten/Kota Provinsi Banten Menurut Klassen Typologi Tahun 2001 – 2011	96
Tabel 4.8	Perkembangan Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2001 – 2011	98
Tabel 4.9	Hasil Estimasi Regresi Utama	99
Tabel 4.10	Auxilliary Regression	100
Tabel 4.11	Hasl Uji White Heteroscedasticity	101
Tabel 4.12	Hasil Uji Breush-Godfrey	102
Tabel 4.13	Ringkasan Hasil Regresi dengan Kaidah Newey-West	103
Tabel 4.14	Uji F ($\alpha=10\%$) Persamaan VW	104
Tabel 4.15	Uji t ($\alpha=10\%$)	105
Tabel 4.16	Dummy Effect Hasil Regresi	106
Tabel 4.17	Persamaan Regresi Tiap Kabupaten/Kota	107

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2001-2011	6
Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2001 – 2011	8
Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2001 – 2011	11
Gambar 1.4 Perkembangan Rasio Gini Provinsi Banten Tahun 2001 – 2011 ...	12
Gambar 2.1 Kurva Kuznet “U-terbalik”	30
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	61
Gambar 4.1 Peta Provinsi Banten	80
Gambar 4.2 Perkembangan PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2001-2011	88

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Data Mentah	119
Lampiran II Tipologi Klassen	121
Lampiran III Hasil Regresi	124
Lampiran IV Uji Asumsi Klasik	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu Negara yang menjadi agenda setiap tahunnya. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial. Menurut Arsyad (2010), Pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Sedangkan menurut Meier (1960) dalam Mugihardjo (2007), pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan nasional riil per kapita meningkat dalam waktu lama. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil. Menurut Todaro (2006) proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; 2) peningkatan standar hidup; dan 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial.

Salah satu target yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi (Shanti dan Maruto, 2007). Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan meningkat dengan hanya melihat pada pertumbuhan ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya meningkat maka dapat

dikatakan pembangunan ekonomi meningkat. Menurut para ekonom dalam Arsyad (1999), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal tersebut dapat diartikan pertumbuhan ekonomi hanya melihat kenaikan dari pendapatan nasional atau dalam hal ini adalah GDP atau PDB. Pendapatan nasional menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai pada suatu tahun tertentu, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun (Lincoln Arsyad, 2010). Menurut Todaro (2006), Selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan adalah menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Tabel 1.1
Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2001-2011

Tahun	PDB	Pertumbuhan
2001	1.440.405,70	3,6
2002	1.505.216,40	4,5
2003	1.577.171,30	4,8
2004	1.656.516,80	5,0
2005	1.750.815,20	5,7
2006	1.847.126,70	5,5
2007	1.964.327,30	6,3
2008	2.082.456,10	6,0
2009	2.178.850,40	4,6
2010*	2.313.838,00	6,2
2011**	2.463.242,00	6,5

Sumber: BPS (data diolah)

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Data yang disajikan pada tabel 1.1 menggambarkan perkembangan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2001 - 2011. Dari tabel diatas, dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi 1998/1999 menunjukkan perkembangan yang positif atau terus mengalami kenaikan. Ditengah ketidakpastian dunia pasca krisis 1998/1999 kemudian dilanjutkan dengan krisis keuangan global pada tahun 2008, ekonomi Indonesia terus mengalami tren

pertumbuhan yang positif. akan tetapi pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,2 % dari 5,7% pada tahun 2005 menjadi 5,5%. Penurunan juga terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 1,4% dari angka 6% pada tahun 2008 menjadi 4,6% pada tahun 2009. Penurunan ini terjadi disebabkan dampak krisis keuangan global yang terjadi di negara adidaya Amerika Serikat kepada seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.

Pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat atau secara nasional, tetapi juga menjadi agenda setiap daerah dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 2010). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengelola potensi dan sumber daya yang ada bagi masing-masing daerah.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan masing-masing daerah tidak dapat lepas dari permasalahan pertumbuhan dan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah atau daerah yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat mengatasi permasalahan ketimpangan antar daerah. Ketimpangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah/wilayah pada waktu/kurun waktu tertentu. Menurut Shinta dan

Maruto (2010), disparitas pertumbuhan regional dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah semakin meningkat, hal ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat pembangunan yang membawa dampak perbedaan tingkat kesenjangan antar daerah.

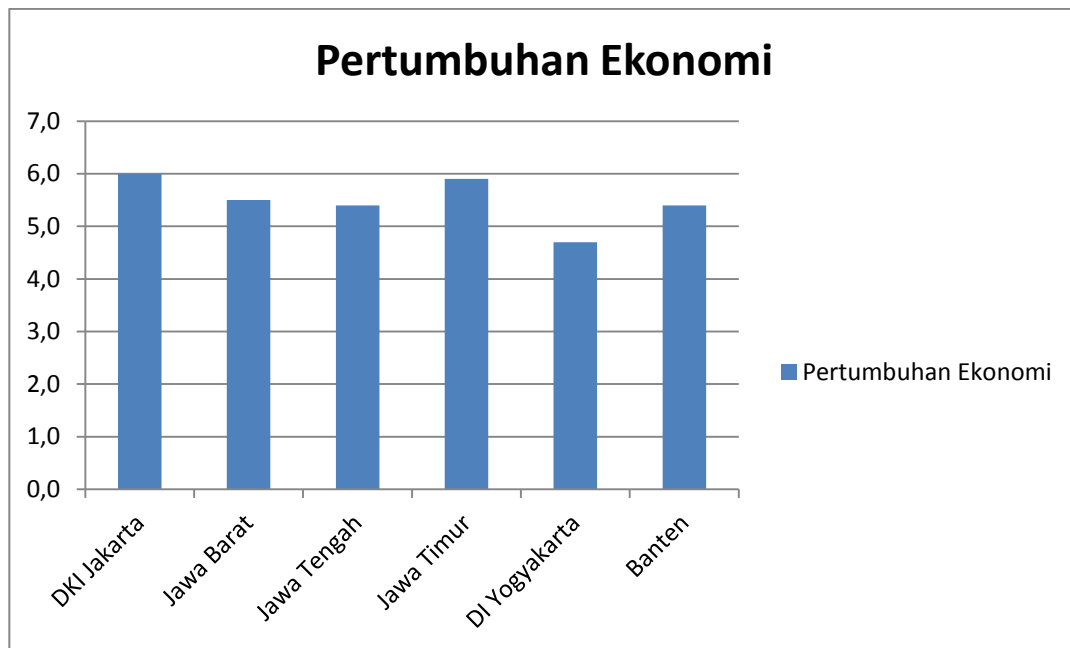
Menurut Lincoln Arsyad (2010) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Jadi pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan “*Trickle Down Effects*” atau efek cucuran kebawah dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan bahkan berjalan cenderung sangat lambat. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini (Lincoln Arsyad. 2010). Menurut Gama (2007), disparitas antar daerah tidak dapat dihindari akibat tidak terjadinya efek perembesan ke bawah (*trickle down effect*) dari output secara nasional terhadap masyarakat mayoritas bahkan sampai saat sekarang.

Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang.

Trade off atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di masing-masing daerah selalu terjadi. Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Hipotesis ini dikenal sebagai hipotesis “U-terbalik” Kuznets Menurut Kuznet distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006).

Gambar 1.1

Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2001-2011



Sumber: BPS (data diolah)

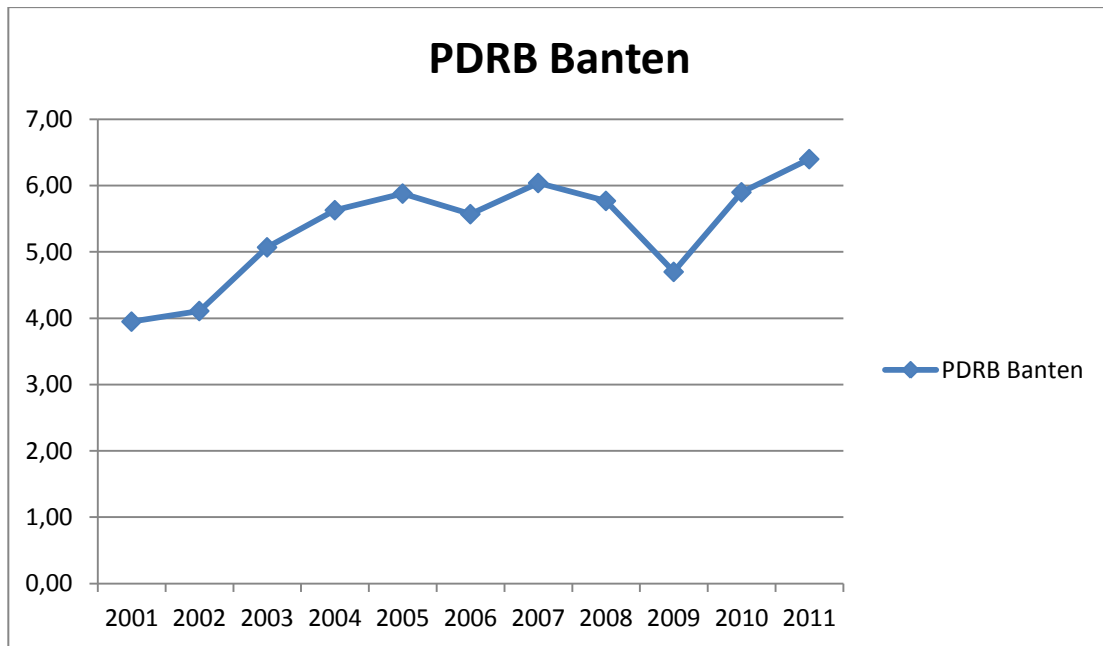
Gambar 1.1 merupakan data rata-rata pertumbuhan ekonomi 6 provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2001-2011. Dari data yang tersaji pada gambar 1.1, dapat

dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa mengalami tren pertumbuhan positif. Provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa selama 11 tahun terakhir adalah DKI Jakarta yaitu sebesar 6%. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan bisnis dan juga sebagai pusat pemerintahan sehingga terjadi konsentrasi kegiatan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Setelah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah kedua yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu sebesar 5,9%, kemudian disusul Provinsi Jawa Barat dengan 5,5%, Jawa Tengah 5,4%, Banten 5,4% dan DI Yogyakarta sebesar 4,7%. Dari data-data yang disebutkan sebelumnya, terdapat salah satu provinsi yang digolongkan sebagai provinsi baru yang mampu bersaing atau memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu Provinsi Banten.

Provinsi Banten merupakan provinsi yang terletak paling barat Pulau Jawa. Berbatasan dengan ibukota negara DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat membuat Provinsi Banten menjadi daerah paling strategis. Provinsi Banten merupakan bentukan provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 dan menjadi provinsi ke-28 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan keunggulan strategis dari sisi lokasi, membuat perekonomian Banten bergerak cepat dan tumbuh dari tahun ke tahun. Gambar 1.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dari tahun 2001-2011.

Gambar 1.2

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2001-2011



Sumber: Banten Dalam angka, BPS

Dari Gambar 1.2 yang tersaji diatas, dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten mengalami tren positif dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2008 dan 2009 pertumbuhan ekonomi cenderung menurun atau melambat. Hal ini dikarenakan dampak dari krisis keuangan global yang terjadi di Amerika Serikat yang secara tidak langsung berimbas pada perekonomian Provinsi Banten. Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten berada pada kisaran angka 6,05% dan melambat pada tahun 2008 dan 2009 yaitu pada angka 5,77 dan 4,69. Pada tahun 2010, ketika perekonomian global cenderung membaik dan diikuti juga oleh perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten melonjak jauh pada

kisaran 22,90% atau naik sebesar 18,21%. Pada tahun 2011, perekonomian Banten kembali melambat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,43% atau setaraf dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pelambatan terjadi kembali dikarenakan situasi global yang kembali terguncang dikarenakan krisis utang yang dialami negara-negara eropa, sehingga membuat perekonomian dunia melambat yang berdampak pada perekonomian dibawahnya termasuk Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil pemekaran tahun 2000, saat ini Provinsi Banten memiliki 8 daerah administrasi yaitu terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota dan Kota Serang dipilih sebagai ibukota provinsi. Keempat kabupaten tersebut adalah Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak, sedangkan keempat kota yaitu Tangerang Kota, Serang, Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Pada penelitian ini Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan dimasukkan pada daerah induk yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang dikarenakan kedua kota tersebut merupakan daerah baru hasil pemekaran pada tahun 2008 dan 2009 sehingga ketersediaan data yang relatif sedikit.

Tabel 1.2**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2007-2011 (Miliar Rupiah)**

Tahun	Kab. Pandeglang	Kab. Lebak	Kab. Tangerang**	Kab. Serang***	Kota Tangerang	Kota Cilegon
2001	2.845,97	2.858,62	12.970,10	6.836,54	16.890,07	7.210,51
2002	2.919,60	2.943,83	13.486,98	7.089,01	17.888,27	7.723,22
2003	3.052,87	3.046,91	14.401,07	7.317,28	18.987,72	8.281,37
2004	3.211,07	3.170,53	15.323,65	7.638,40	20.079,27	8.886,74
2005	3.398,59	3.289,22	16.445,46	7.973,37	21.462,17	9.440,71
2006	3.510,27	3.392,78	18.735,00	8.357,68	22.932,60	9.972,85
2007	3.667,47	3.559,03	19.974,01	8.785,79	24.505,12	14.706,00
2008	3.824,71	3.703,58	21.207,87	9.172,97	26.066,99	15.461,00
2009	3.985,78	3.855,54	22.329,96	9.521,64	27.562,53	16.246,80
2010	4.321,10	4.152,20	23.927,40	10.019,30	29.402,86	17.111,20
2011*	4.554,60	4.419,50	25.766,20	10.650,80	31.469,90	18.228,70

Sumber: Banten Dalam Angka tahun 2001-2012

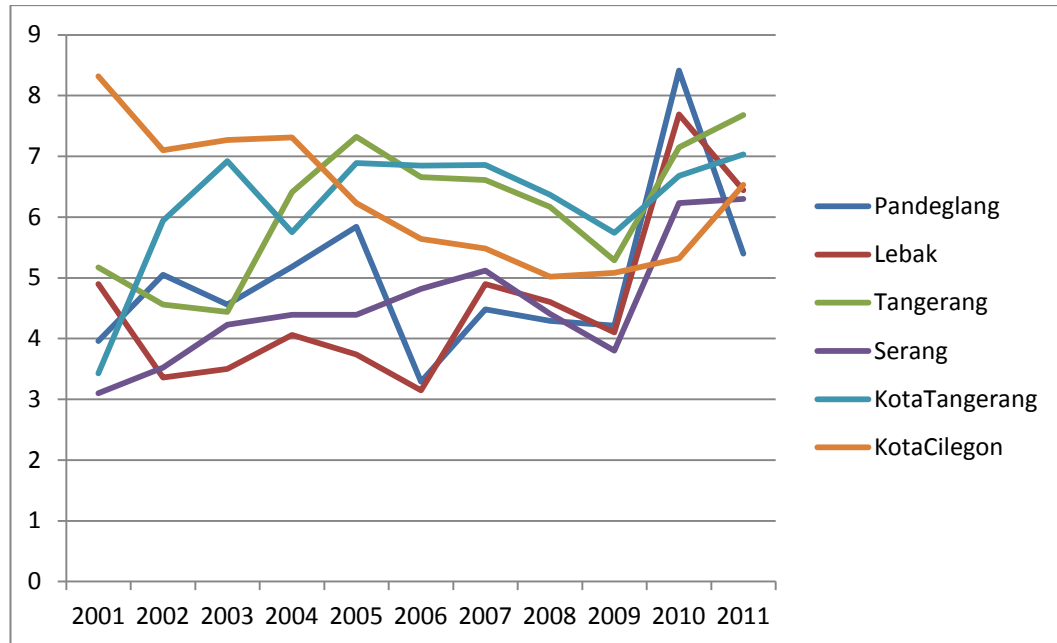
Keterangan: *) Angka Sementara

***) Tahun 2009-2011 termasuk Kota Tangerang Selatan

****) Tahun 2008-2011 termasuk Kota Serang

Gambar 1.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2001-2011



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

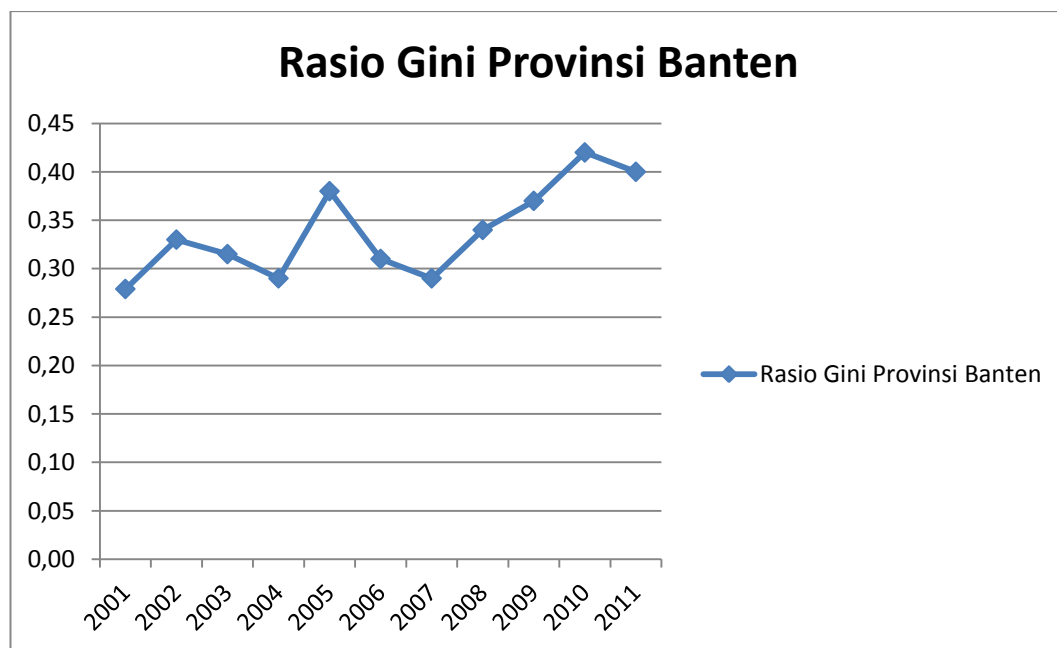
Berdasarkan data atau Tabel 1.2 dan Gambar 1.3 yang disajikan diatas, menunjukkan bahwa perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2001-2011 mengalami pertumbuhan yang positif selama kurun waktu 11 tahun. Terdapat empat kota yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu Kota cilegon dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu Kota cilegon dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 10,30%, Kabupaten Tangerang 7,13 dan Kota Tangerang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,42%. Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB Provinsi Banten, Kota tangerang memiliki kontribusi tertinggi diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Banten disusul Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon. Pertumbuhan ekonomi yang

tinggi di kota dan kabupaten yang berada di Provinsi Banten didukung oleh sektor industri dan perdagangan serta jasa yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian kota-kota di Provinsi Banten.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Provinsi Banten diikuti dengan meningkatnya tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio gini. Rasio gini adalah ukuran ketimpangan yang sering digunakan. Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan rasio gini Provinsi Banten tahun 2001-2011.

Gambar 1.4

Perkembangan Rasio Gini Provinsi Banten Tahun 2001-2011



Sumber: Banten Dalam Angka (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.4 diatas tentang perkembangan rasio gini Provinsi Banten tahun 2001-2011, dapat terlihat bahwa dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio gini cenderung meningkat. Pada tahun 2001 rasio gini Provinsi Banten berada pada angka 0,28 atau dapat

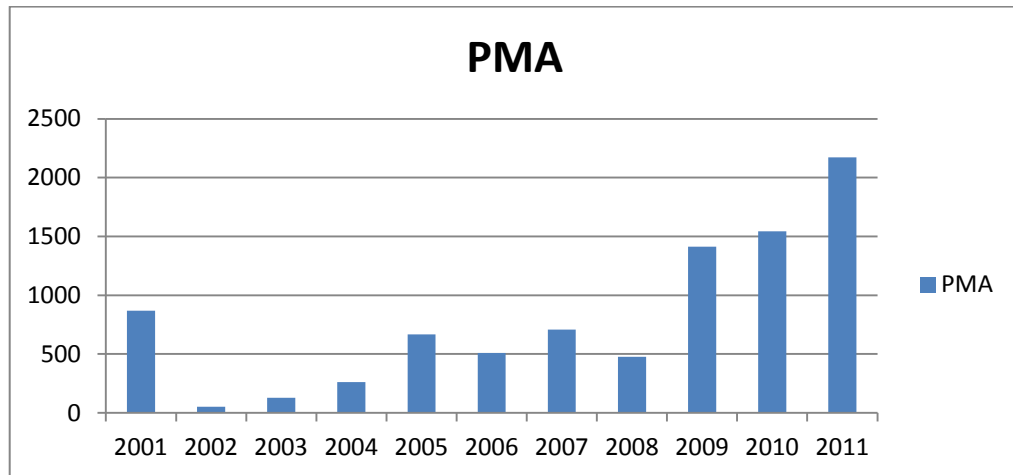
dikatakan tingkat ketimpangan masih dalam kategori rendah, sedangkan pada tahun 2011 rasio gini Provinsi Banten meningkat menjadi 0,40. Sejak berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2001 sampai tahun 2011, dapat disimpulkan tingkat ketimpangan di Provinsi Banten meningkat.

Ketimpangan pada suatu wilayah atau antar memang merupakan kondisi alamiah atau natural yang terjadi. Menurut Sjafrizal (2012), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa.

Investasi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Investasi dibagi menjadi dua yaitu investasi yang dilakukan swasta (penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN)) dan investasi yang dilakukan pemerintah. Investasi swasta mempunyai peranan penting untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah melalui penyerapan tenaga kerja pada wilayah tersebut. Akan tetapi, menurut Myrdal (1957) dalam Jhingan (2010) mengungkapkan bahwa investasi akan menyebabkan terjadinya ketimpangan. Provinsi Banten merupakan daerah potensial yang menjadi sasaran investasi yang dilakukan oleh swasta.

Tabel 1.3

**Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Banten Tahun 2001-2011 (ribu US\$)**



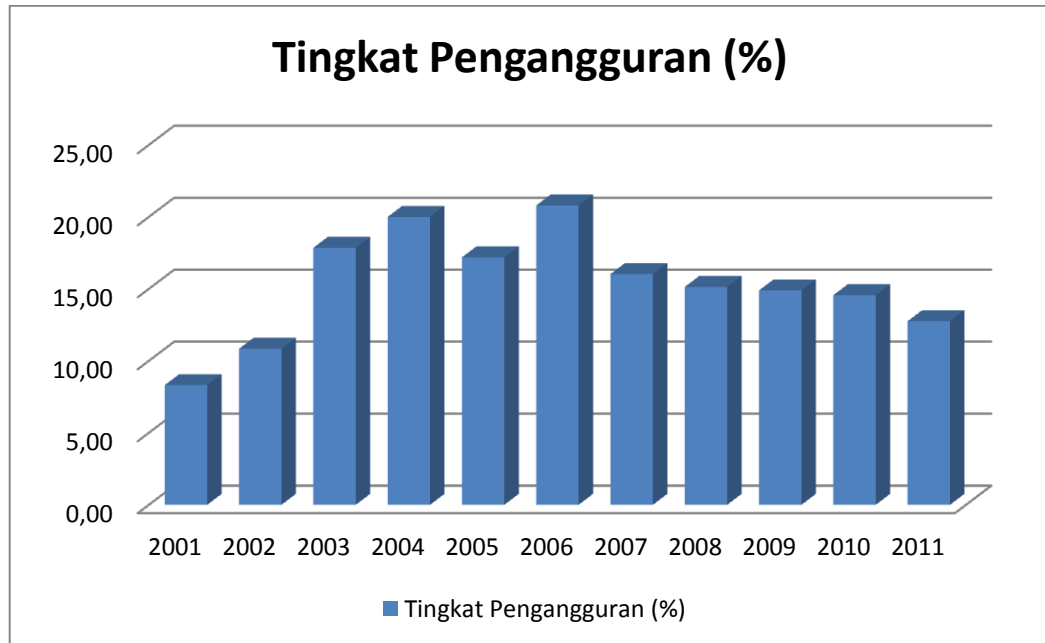
Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data atau Tabel 1.3 tentang perkembangan penanaman modal asing (PMA), menunjukkan bahwa dari tahun 2001 sampai dengan 2011 perkembangan PMA menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2001 realisasi PMA Provinsi Banten sebesar 868,1 ribu US\$ dan pada tahun 2011, nilai PMA meningkat menjadi 2.171,7 ribu US\$.

Tidak hanya investasi atau PMA yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan antar wilayah, faktor perbedaan demografi juga memiliki peranan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan. Tabel 1.5 menggambarkan tentang perkembangan tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2001-2011.

Tabel 1.4

Tingkat Pengangguran Provinsi Banten Tahun 2001-2011



Berdasarkan Tabel 1.4, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Banten mengalami tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2001, tingkat pengangguran di Provinsi Banten mencapai 8,32 % dan terus meningkat sampai tahun 2004 yaitu sebesar 20 %. Pada tahun 2005 tingkat pengangguran di Provinsi Banten mengalami penurunan menjadi 17,19 % dan kembali meningkat pada 2006 sebesar 20,79 %. Mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2011, tingkat pengangguran terus mengalami penurunan yaitu 16,03 % tahun 2007 dan 12,76 % pada 2011. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Banten cenderung meningkat sejak pasca pemekaran pada tahun 2001 hingga tahun 2011.

Tabel 1.5

**Perkembangan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2001-2011**



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, perkembangan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan provinsi banten mengalami peningkatan yang cukup signifikan pasca pemekaran pada tahun 2001 sampai 2011. Pada tahun 2001, realisasi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sebesar 217 miliar rupiah dan pada tahun 2011 mencapai 1,7 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah yang cukup besar dalam melakukan proses pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya akan mengurangi ketimpangan.

Selama lebih dari 10 tahun pasca pemekaran wilayah atau pembentukan baru, Provinsi Banten telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan positif ternyata diikuti dengan tingkat ketimpangan yang cenderung meningkat selama 11 tahun terakhir. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran”**.

1.2 Perumusan Masalah

Provinsi Banten merupakan provinsi ke-28 di Indonesia yang berdiri pada tahun 2000 hasil dari pemekaran Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten selama kurun waktu 11 tahun mengalami pertumbuhan yang positif dan tinggi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Banten lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya yang berada di Pulau Jawa. Tujuan dari pemekaran suatu wilayah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat ketimpangan. Pada tahun 1955 muncul hipotesis ‘U terbalik’ Simon Kuznets tentang ketimpangan pada tahap awal pembangunan. Dalam kurun waktu 11 tahun, tingkat ketimpangan di Provinsi Banten yang tercermin dari perkembangan rasio gini pada gambar 1.2 cenderung meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan positif ternyata tidak serta merta akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Berdasarkan data yang disajikan pada latar belakang, pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten pasca pemekaran Wilayah?
2. Bagaimana pengklasifikasian kabupaten/kota di Provinsi Banten berdasarkan tipologi klassen?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan di Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah dan seberapa besar pengaruhnya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis besarnya tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah.
2. Mengklasifikasikan kabupaten/kota di Provinsi Banten berdasarkan tipologi klassen
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah.

1.3.2 Kegunaan

- 1) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

- 2) sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan yang akan dilakukan di kemudian hari.
- 3) sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagaian pendahuluan yang berisi : latarbelakang, masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Bab ini juga menungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilandaskan secara operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat tentang Provinsi Banten dan dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010). Menurut Meier (1995) dalam Kuncoro (2006), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang merupakan kunci dalam melihat suatu pengertian pembangunan ekonomi.

Suatu proses pembangunan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Menurut Todaro (2006) proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; 2) peningkatan standar hidup; dan 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Disamping memiliki tujuan inti, pembangunan secara garis besar memiliki indikator-indikator kunci yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial. Yang termasuk sebagai indikator ekonomi adalah GNP per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, GDP per kapita dengan *Purchasing Power*

Parity, sedangkan yang termasuk indikator sosial adalah *Human Development Index* (HDI) dan *Physical Quality Life Index* (PQLI) atau indeks mutu hidup (Kuncoro, 2006).

2.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Arsyad (2010) mengartikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembanguan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Arsyad, 2010).

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata (Arsyad, 2010).

Menurut Arsyad (2010) keadaan sosial ekonomi yang berbeda disetiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan, akan pindah kedaerah yang melakukan ekspansi tersebut seperti yang diungkapkan Myrdal (1957) dalam Jhingan (2010) mengenai dampak balik pada suatu daerah.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari indikator keberhasilan suatu proses pembangunan ekonomiyang terjadi pada suatu negara atau wilayah. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan ekonomi. pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan kapasitas penawaran atau produksi barang dan jasa yang berdasarkan pada peningkatan teknologi, penyesuaian ideologi dan kelembagaan yang dibutuhkan. Sedangkan pembangunan ekonomi mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan dan alokasi sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Todaro, 2006).

Sumitro Djojohadikusumo (1987) dalam Budiantoro (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sedangkan menurut Kuznets dalam Todaro (2006) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow, Pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian mulai dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor pertanian dimana produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur (Pratama, 2010).

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik seperti Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan, sedangkan menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi atau wiraswasta (*entrepreneur*) (Pratama, 2010). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2006).

Menurut Todaro (2006), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Akumulasi modal

Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.

2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (labor force) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni:

- a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
- b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja atau hemat modal, yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.
- c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Untuk menghitung angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
2. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir seperti: (a) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, (b)

konsumsi pemerintah, (c) pembentukan modal tetap domestik bruto, (d) perubahan stok, dan (e) ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

3. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

PDRB ADHB digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB ADHB menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun.

PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun. Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut.

PDRB ADHB menurut sektor menunjukkan peranan sektor ekonomi dalam suatu daerah, sektor-sektor yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Dengan demikian PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balasan jasa terhadap faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

2.1.5 Ketimpangan Pembangunan

Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*) (Sjafrizal, 2012).

Menurut Kuncoro (2006), kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat, sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012).

Menurut Hipotesa Neo-Klasik dalam Sjafrizal (2012), pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah

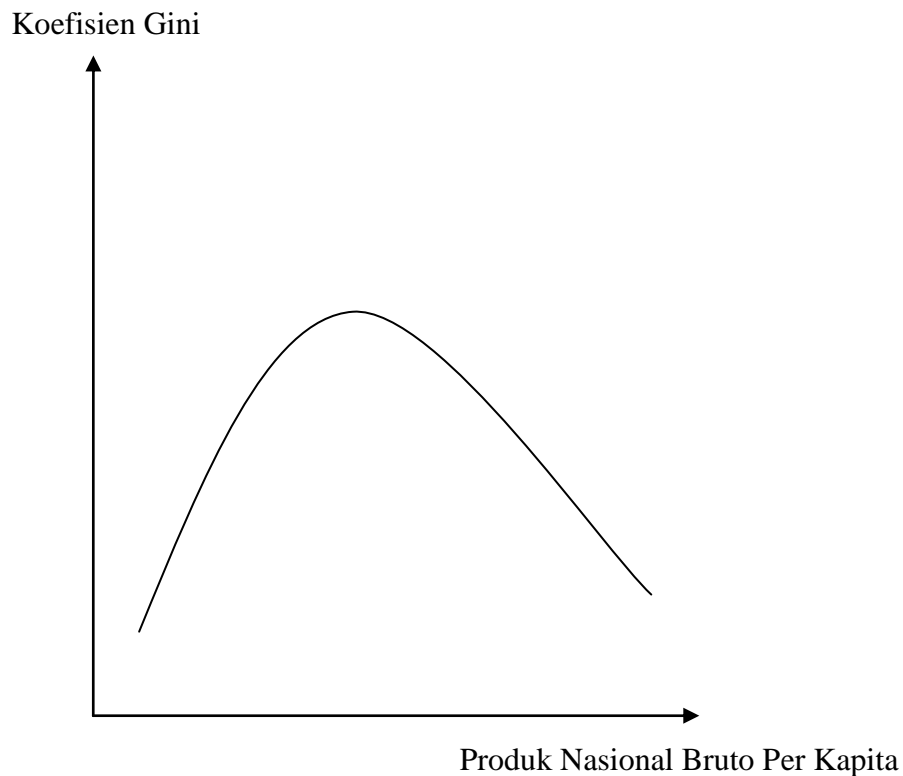
cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf u terbalik.

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik yang diformulasi secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2012).

Simon Kuznet (1955) dalam Todaro (2006) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan menaik. Observasi inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat

dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern.

Gambar 2.1
Kurva Kuznets “U-Terbalik”



Sumber: Todaro (2006)

Terjadinya ketimpangan antar daerah juga dijelaskan oleh Myrdal (1957) dalam Jhingan (2010). Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal itu menggunakan *spread effect* dan *backwash effect* sebagai bentuk pengaruh penjaralan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar.

Spread effect (dampak sebar) didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan (*favourable effect*), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan

investasi di pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Backwash effect* (dampak balik) didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan (*infavourable effect*) yang mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran modal ke wilayah inti sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti.

Terjadinya ketimpangan regional menurut Myrdal (1957) disebabkan oleh besarnya pengaruh dari *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang. Perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan regional, permintaan yang meningkat ke wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 2010).

2.1.6 Ukuran Ketimpangan Pembangunan

Menurut Sjafrizal (2012) Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah indeks williamson yang dikemukakan oleh Williamson (1965). Williamson mengemukakan model V_w (indeks tertimbang atau *weighted index* terhadap jumlah penduduk) dan V_{uw} (tidak tertimbang atau *un-weighted index*) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun

demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2012). Formulasi Indeks Williamson yang digunakan menurut Sjafrizal (2012) yaitu:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y} \quad 0 < V_w < 1$$

V_w = Indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita daerah i

y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Pengertian indeks ini adalah sebagai berikut: bila V_w mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila V_w mendekati nol berarti sangat merata.

Indeks lainnya yang lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah *Theil Index* sebagaimana digunakan oleh Akita dan Alisyahbaha (2002) dalam studinya yang dilakukan di Indonesia (Sjafrizal, 2012). Data yang digunakan dalam indeks Theil ini sama halnya dengan data yang digunakan dalam indeks Williamson. Demikian pula halnya dengan penafsirannya yang juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. Formulasi Theil index (T_d) adalah sebagai berikut (Sjafrizal, 2012):

$$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left\{ \frac{y_{ij}}{Y} \right\} \log \left[\frac{\{y_{ij}/Y\}}{\{n_{ij}/N\}} \right]$$

Di mana: y_{ij} = PDRB per kapita kabupaten i di provinsi j

Y = Jumlah PDRB per kapita seluruh provinsi j

n = Jumlah penduduk kabupaten in di provinsi j

N = Jumlah penduduk seluruh kabupaten

Menurut Sjafrizal (2012), penggunaan Theil Index sebagai ukuran ketimpangan ekonomi antarwilayah mempunyai kelebihan tertentu. Pertama, indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Kedua, dengan menggunakan indeks ini dapat pula dihitung kontribusi masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan kebijakan yang cukup penting.

2.1.7 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) yaitu :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih

tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

2. Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transportasi bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2010) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu: (a) Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita; (b) Inflasi di mana

pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang; (c) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah; (d) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah; (e) Rendahnya mobilitas sosial; (f) Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (g) Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang; dan (h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

2.1.8 Tipologi Daerah

Pendekatan tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur ekonomi masing-masing daerah. Dengan menggunakan alat tipologi klassen adalah dengan pendekatan wilayah/daerah seperti yang digunakan dalam penelitian Syafrizal untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal. Seperti pada pendekatan pertama, pendekatan wilayah juga menghasilkan empat klasifikasi kabupaten yang

masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu :

1. Daerah bertumbuh maju dan cepat (*rapid growth region*)

Daerah maju dan cepat tumbuh (*rapid growth region*) adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat. Karena diperkirakan daerah ini akan terus berkembang dimasa mendatang.

2. Daerah maju tapi tertekan (*retarded region*).

Daerah maju tapi tertekan (*retarded region*) adalah daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

3. Daerah berkembang cepat (*growing region*).

Daerah berkembang cepat (*growing region*) pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena itu dimasa mendatang daerah ini diperkirakan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

4. Daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*).

Kemudian daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang berada dibawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa didaerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya Syafrizal, 1997 (kuncoro, 2002)

2.1.9 Penanaman Modal Asing (PMA)

Investasi berarti setiap kegiatan yang meningkatkan kemampuan ekonomi untuk memproduksi output di masa yang akan datang. Menurut Sukirno (2010), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Besar kecilnya investasi dalam suatu kegiatan ekonomi ditentukan oleh tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, ramalan kondisi ekonomi ke depan, dan faktor-faktor lainnya.

Menurut Mankiw (2007), investasi terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu *business fixed investment*, *residential investment*, dan *inventory investment*. *Business fixed investment* mencakup peralatan dan sarana yang digunakan perusahaan dalam proses produksinya, sementara *residential investment* meliputi pembelian rumah baru, baik yang akan ditinggali oleh pemilik sendiri maupun yang akan disewakan kembali, sedangkan *inventory investment* adalah barang yang disimpan oleh perusahaan di gudang, meliputi bahan baku, persediaan, bahan setengah jadi, dan barang jadi.

Investasi dibagi menjadi dua yaitu investasi yang dilakukan oleh pihak swasta dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi Swasta dibagi menjadi dua yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Krugman (2005), menjelaskan bahwa yang dimaksud FDI atau PMA adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara

mendirikan atau memperluas perusahaannya ke negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumberdaya, tetapi juga pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri.

Investasi asing (PMA) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal asing didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha dalam negeri, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.10 Hubungan penanaman modal asing dengan ketimpangan pembangunan

Investasi termasuk didalamnya penanaman modal asing (PMA) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, menurut Myrdal (1957) dalam Jhingan (2010) investasi cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Permintaan yang meningkat di wilayah maju akan

merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang. Hal ini dibuktikan secara empiris oleh Shinta dan Maruto (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Disparitas Pendapatan Antar Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Wilayah Pantura Propinsi Jawa Tengah)”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ketimpangan investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan.

2.1.11 Pengangguran

Menurut Payaman J. Simanjutak (1985), penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Menurut Sadono Sukirno (2010), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok (Sadono Sukirno, 2010) :

a. Pengangguran normal atau friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, Akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

b. Pengangguran siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan

kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

c. Pengangguran struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negaranegara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

d. Pengangguran teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput,

misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok (Sadono Sukirno, 2010) :

a. Pengangguran terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri.

b. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

c. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran musiman.

d. Setengah Menganggur

Pada negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*). Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

2.1.12 Hubungan tingkat pengangguran dengan ketimpangan pembangunan

Kondisi demografi sangat berkaitan dengan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Menurut Sjafrizal (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah salah satunya adalah karena perbedaan kondisi demografis. Demografis disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan termasuk didalamnya adalah tingkat pengangguran. Daerah dengan kondisi demografisnya baik akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga akan mendorong peningkatan investasi ke daerah yang bersangkutan. Lessman (2006) melihat kondisi demografis dari sisi tingkat

pengangguran suatu daerah. Menurut Lessman, tingkat pengangguran yang tinggi berhubungan dengan semakin ingginya ketimpangan wilayah.

2.1.13 Pengeluaran Pemerintah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk memperluas kemampuan dan kebebasan memilih. Terciptanya pembangunan ekonomi sangat tergantung dari peran pemerintah yang antara lain dimanifestasikan lewat pengeluaran pemerintah. Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi tiga golongan (Mangkoesoebroto, 2008), yaitu:

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran daerah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin besar. Meskipun demikian, peranan pemerintah tetap besar pada tahap ini karena peranan swasta yang semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan

pemerintah harus menyediakan barang dan jasa public dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu pada tahap menengah, perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor ekonomi yang makin kompleks, sehingga pemerintah harus turun tangan untuk melindungi penduduk dari eksternalitas negatif suatu sektor dan melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Musgrave juga berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, persentase investasi swasta terhadap PDB akan semakin besar dan sebaliknya persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana kepada pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB yang semakin besar, yaitu dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan "*The Law of Expanding State Expenditure*". Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris terhadap negara-negara maju. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar,

terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang public. Wagner hanya mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lain.

3. Teori Peacock and Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi (PDB) menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Peningkatan PDB dalam keadaan normal menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila dalam keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena perang, maka pemerintah harus memperbesar penerimaannya untuk membiayai perang.

Satu hal yang perlu dicatat dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapa toleransi pajak tersebut. Clarke menyatakan bahwa limit perpajakan adalah sebesar 25 persen dari pendapatan nasional. Apabila limit dilampaui maka akan terjadi inflasi dan gangguan lainnya.

2.1.14 Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah di Indonesia selain menjadi sumber pembiayaan bagi program-program sosial, juga berperan besar dalam meningkatkan dan mempertahankan permintaan agregat serta pertumbuhan ekonomi. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Menurut fungsi pemerintahan, pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari belanja untuk fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi pendidikan dan belanja untuk fungsi perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis kegiatan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 50, pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Belanja langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya dan kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja barang modal. Keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabelitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

2. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja

bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Keberadaan belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dari ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum.

2.1.15 Hubungan pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan pembangunan

Peranan pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi suntikkan perekonomian melalui program-program atau kegiatan untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah.

2.1.16 Pemekaran Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU Pemda), pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Sementara dalam prakteknya sampai dengan tahun 2008, Indonesia belum pernah mempunyai pengalaman penggabungan daerah. Secara umum, pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.

Disisi lain, menurut Syafrizal (2008), ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain :

1. Perbedaan agama

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu negara/ daerah yang telah ada untuk menjadi negara/ daerah baru.

2. Perbedaan etnis dan budaya

Sama halnya dengan perbedaan agama, perbedaan etnis dan budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang nyaman bila hidup dalam suatu masyarakat dengan etnis, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda. Bila kesatuan budaya ini terganggu karena kehadiran warga masyarakat lain dengan budaya yang berbeda, maka seringkali terjadi ketegangan bahkan konflik sosial dalam masyarakat tersebut.

3. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah

Aspek berikutnya yang cenderung menjadi pemicu terjadinya pemekaran wilayah adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Termasuk juga ke dalam aspek ini adalah ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam bernilai tinggi, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan kemakmuran antar daerah. Ketimpangan ini selanjutnya mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat sehingga akhirnya muncul keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Indikasi terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah dapat diketahui dengan menghitung data PDRB perkapita dan jumlah penduduk sebagai indikator utama melalui Indeks Wiliamson.

4. Luas daerah

Luas daerah dapat pula memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Alasannya adalah karena wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan public tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Sementara tugas pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemekaran daerah.

Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban

Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul dan Nama Penulis	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
<p>“Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000” Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2003)</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah</p>	<p>Tipologi Klassen, indeks ketimpangan Williamson, indeks ketimpangan entropy theil, trend dan korelasi pearson</p>	<p>Selama periode pengamatan terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas yang salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial serta Hipotesis U-Terbalik Kuznet berlaku di Kabupaten Banyumas.</p>
<p>“Fiscal Decentralization, Commitment and regional Disparity: Evidence from state</p>	<p>Desentralisasi, GDP per kapita, panjang jalan, tingkat metropolitan, tingkat pendidikan, manufaktur, efek politik,</p>	<p>Regresi data panel</p>	<p>Variabel desentralisasi, GDP per kapita, tingkat pengangguran signifikan dan berhubungan positif dengan ketimpangan, sedangkan variabel panjang jalan, tingkat</p>

level Cross-sectional Data for the United States” Nobuo Akai dan Masayo Sakata (2005)	investasi, tingkat pengangguran, populasi		metropolitan, pendidikan, manufaktur, dan investasi signifikan dan berhubungan negatif terhadap ketimpangan
“Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries” Christian Lessman (2006)	Tingkat disparitas, koefisien gini dari distribusi populasi regional, bagian dari orang yang hidup di kota, besarnya populasi, GDP per kapita, populasi pekerja sektor pertanian, rasio pengangguran, perdagangan global, pengeluaran sosial, bantuan pemerintah, desentralisasi	Regresi data panel dengan model: $Disparity_{i,t} = \beta_{0i} + \beta_1 Popgini_{it} + \beta_2 Urban_{i,t} + \beta_3 Pop_{i,t} + \beta_4 Gdppc_{it} + \beta_5 Emplagri_{it} + \beta_6 Unempl_{it} + \beta_7 Global_{it} + \beta_8 Social_{it} + \beta_9 Grants_{it} + \beta_{10} Decentr_{it} + \epsilon_{i,t}$	Terdapat beberapa variabel yang signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan. Variabel popgini, gdppc, dan unempl berhubungan positif dengan tingkat ketimpangan, sedangkan variabel pop dan decent berpengaruh negatif terhadap ketimpangan.
“Analisis disparitas pendapatan antar daerah di Jawa Barat”	Pertumbuhan ekonomi, Disparitas pendapatan, penanaman modal dalam	Indeks ketimpangan regional Williamson, analisis data panel dengan metode <i>fixed effect</i>	Dari 25 Kabupaten dan Kota ada 8 daerah yang terdiri 7 Kabupaten dan 1 Kota yang memiliki indeks disparitas

R. Abdul Maqin (2007)	negeri (PMDN), tenaga kerja lulusan SD, tenaga kerja lulusan SMP, tenaga kerja lulusan SMA	IW_{it} $= \alpha_1 + \alpha_2 LnY_{it}$ $+ \alpha_3 LnPMDN_{it} + \alpha_4 LnSD_{it}$ $+ \alpha_5 LnSMP_{it} + \alpha_6 LnSMA_{it}$ $+ e_{it}$	yang lebih besar dari rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hasil estimasi pertumbuhan ekonomi dan PMDN mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap disparitas pendapatan. Dilihat dari tingkat pendidikan tenaga kerja, lulusan SMA memberikan pengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan.
“Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah” Budiantoro Hartono (2008)	Indeks ketimpangan pembangunan, investasi swasta, angkatan kerja, dan alokasi dana bantuan	Indeks ketimpangan Williamson dan analisis regresi linear berganda	ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang diukur dengan Indeks Williamson dalam kurun waktu 1981 sampai dengan 2005 cenderung relatif meningkat. Ketiga variabel independen yaitu investasi swasta perkapita, ratio angkatan kerja, dan alokasi dana pembangunan perkapita secara bersama – sama berpengaruh terhadap

			ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu investasi swasta perkapita, ratio angkatan kerja, dan alokasi dana pembangunan perkapita sebesar 93,7 persen sedangkan sisanya sebesar 6,3 persen dijelaskan faktor-faktor lainnya di luar model.
“Disparitas Pendapatan Antar Daerah (Studi Kasus Kabupaten /Kota di Wilayah Pantura Propinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2003)” Shanti Shintia Nugraha dan Maruto Umar	Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan PDRB perkapita, ketimpangan investasi, dan ketimpangan tenaga kerja	Tipologi Klassen, indeks ketimpangan Williamson, dan analisis data panel $Y_{wit} = \beta_0 + \beta_1 I_{wit} + \beta_2 L_{wit} + \mu_{it}$	Secara rata-rata nilai indeks Williamson di wilayah pantura cenderung menurun, tetapi selama periode pengamatan cukup berfluktuasi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ketimpangan investasi yang terjadi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan

Basuki (2010)			ketimpangan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan.
“Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Di Indonesia Periode 1990-2008” Arman Delis, Rosmeli, Novita Sari (2010)	Disparitas pendapatan dan pendapatan perkapita	Indeks Williamson	Selama periode 1990 – 2008 ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Artinya selama periode tersebut kesenjangan antar wilayah di Indonesia semakin melebar

2.3 Kerangka Pemikiran

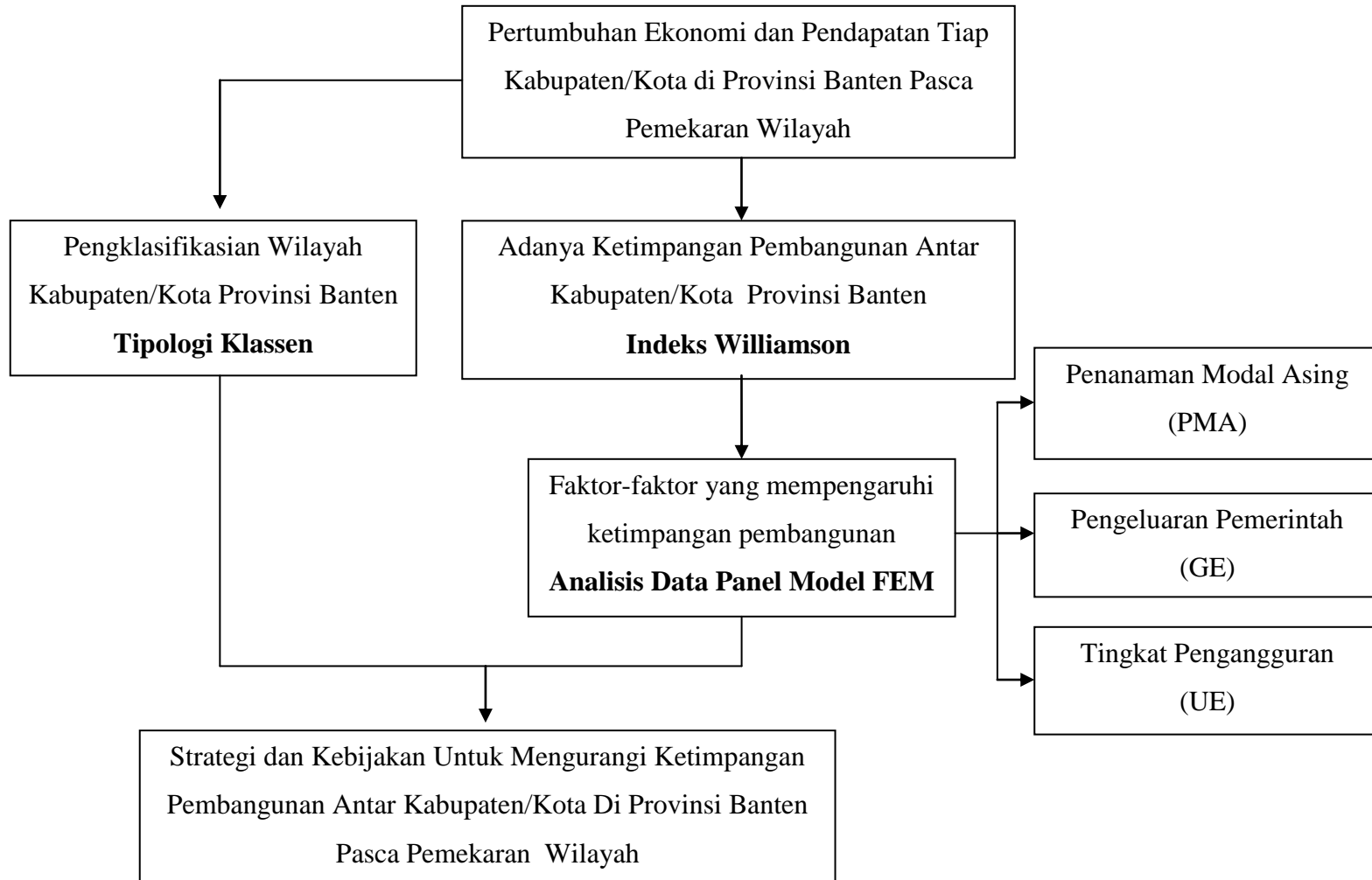
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah yang tercermin melalui PDRB serta pendapatan perkapita. Untuk melihat pengklasifikasian daerah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita tiap kabupaten/kota Provinsi Banten, digunakan tipologi klassen yang membagi tiap-tiap daerah kedalam empat kelompok.

Dalam penelitian ini untuk mengukur ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah menggunakan Indeks Williamson, dengan besaran nilai nol sampai satu. Semakin besar angka Indeks Williamson atau mendekati satu maka semakin besar ketimpangan atau kesenjangan, sebaliknya jika mendekati nol maka semakin merata.

Untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan. Faktor-faktor yang digunakan adalah penanaman modal asing (PMA), pengeluaran pemerintah (GE), dan tingkat pengangguran (UE). Untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketimpangan dan juga dampaknya pada masing-masing daerah, digunakan analisis data panel dengan menggunakan model Fixed Effect (FEM)

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pandangan sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 2009).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten.
2. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten.

Diduga tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Banten.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat), tiga variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan pembangunan wilayah (VW). Sementara untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah Investasi Asing (PMA), Pengeluaran Pembangunan Pemerintah (GE) dan Tingkat Pengangguran (EU).

3.1.2 Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman terhadap variabel dependen maupun independen dalam penelitian ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten, maka diperlukan definisi operasional yakni:

1. Ketimpangan Pembangunan Wilayah (VW)

Ketimpangan pembangunan wilayah diukur dengan menggunakan rumus Indeks Williamson, dimana pendapatan diukur dengan menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten dari tahun 2001

sampai dengan tahun 2011. Indeks ketimpangan pembangunan wilayah ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < I_w < 1$.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing baik dalam perseorangan, badan usaha maupun pemerintah di wilayah Republik Indonesia. Data PMA merupakan data rasio realisasi PMA per kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2001-2011. Satuan data rasio PMA adalah jutaan rupiah. Dikarenakan data yang tersaji tidak lengkap atau terdapat beberapa tahun yang berisikan angka nol, maka dilakukan interpolasi. Interpolasi adalah suatu cara untuk mencari nilai diantara beberapa titik data yang telah diketahui.

$$\text{Rasio PMA} = \frac{\text{Jumlah Realisasi PMA}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

3. Pengeluaran Pemerintah (GE)

Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung sering disebut sebagai belanja pembangunan atau pengeluaran pembangunan, sedangkan belanja tidak langsung sering disebut dengan belanja atau pengeluaran rutin. Pada penelitian ini belanja langsung atau pengeluaran pembangunan dipakai untuk mencerminkan variabel pengeluaran pemerintah (GE). variabel pengeluaran pemerintah menggunakan data rasio pengeluaran pemerintah dengan satuan juta rupiah.

$$\text{Rasio GE} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Pembangunan Pemerintah}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

4. Tingkat Pengangguran

Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Tingkat pengangguran merupakan persentase dari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam periode waktu tertentu.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2004). Data dalam penelitian ini bersumber dari instansi-instansi terkait. Data-data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. PDB Indonesia ADHK tahun 2001-2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
2. PDRB Provinsi Banten ADHK tahun 2001-2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
3. PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2001-2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
4. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2001-2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
5. Jumlah penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2001-2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

6. Realisasi investasi (PMA dan PMDN) Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2001-2011 yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
7. Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2001-2011 yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS)
8. Jumlah pengangguran dan angkatan kerja Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2001-2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan yang meliputi populasi Indonesia. Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian untuk mendapatkan masukan yang dibutuhkan.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Analisis Ketimpangan (Indeks Williamson)

Williamson dalam Sjafrizal (2008) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi. Penelitiannya menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan negara berkembang. Ternyata ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi semakin lebar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Indeks ketimpangan regional untuk menggambarkan ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 x \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}}$$

V_w = Indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita di kabupaten/kota i

\bar{y} = PDRB per kapita rata-rata di Provinsi Banten

f_i = Jumlah penduduk di kabupaten/kota i

n = Jumlah penduduk di Provinsi Banten

Indeks williamson besarnya antara nol dan satu. Semakin kecil angka yang dihasilkan menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dapat dikatakan makin merata. Tetapi jika angka yang didapat mendekati satu maka ketimpangan semakin lebar.

3.4.2 *Klassen Typology*

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan kesenjangan klasifikasi tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten. Menurut Sjafrizal (1997) Analisis ini didasarkan pada dua indikator utama yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan per kapita di suatu daerah. Analisis ini membagi empat klasifikasi daerah yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yaitu:

1. Kuadran I yaitu daerah maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.
2. Kuadran II yaitu daerah maju tapi tertekan (*low growth but high income*) merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih rendah tapi pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.

3. Kuadran III yaitu daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.
4. Kuadran IV yaitu daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding provinsi.

Tabel 3.1

Klasifikasi Kabupaten/kota menurut *Klassen Typologi*

\bar{R}	$Y_{ij} > \bar{Y}_j$	$Y_{ij} < Y_j$
$R_{ij} > \bar{R}_j$	Kuadran I Daerah maju dan tumbuh cepat	Kuadran III Daerah berkembang cepat
$R_{ij} < \bar{R}_j$	Kuadran II Daerah maju tapi tertekan	Kuadran IV Daerah tertinggal

3.4.3 Metode Data Panel

Data panel adalah gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtun waktu (*time series*). Menurut Wibisono (2005) dalam Ajija (2011), dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel cross section maupun time series, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah *omitted-variables*, model yang mengabaikan variabel yang relevan. Untuk mengatasi interkorelasi di antara variabel-variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi, metode data

panel lebih tepat untuk digunakan (Ajija, 2011). Hsiao (1986) dalam Firmansyah (2009), mencatat bahwa penggunaan panel data dalam penelitian ekonomia memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis cross section maupun time series.

1. Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien.
2. Panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja.
3. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section.

Di samping berbagai keunggulan dimiliki model panel data tersebut, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pemamfaatan data jenis panel, yaitu permasalahan autokorelasi dan heteroskedastisitas. Sementara itu ada permasalahan baru yang muncul seperti korelasi silang (cross-correlation) antar unit individu pada periode yang sama.

3.4.3.1 Model Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel untuk mengetahui pengaruh variabel penanaman modal asing (PMA), variabel pengeluaran pembangunan pemerintah (GE), dan variabel tingkat pengangguran (UE) terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah (VW) di Provinsi Banten. Model dasar data panel yaitu:

$$Y_{it} = \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \dots\dots\dots$$

(3.1)

Model fungsi yang akan digunakan untuk mengetahui ketimpangan antar wilayah di Provinsi Banten yaitu:

$$VW = f (PMA, GE, UE) \dots\dots\dots$$

(3.2)

dimana :

VW = ketimpangan pembangunan wilayah

PMA = penanaman modal asing

GE = pengeluaran pembangunan pemerintah

UE = tingkat pengangguran

i = cross section

t = time series

β = koefisien

μ = error

3.4.3.2 Regresi Model Data Panel Pendekatan Fixed Effect

Estimasi model regresi dengan data panel dapat menggunakan pendekatan fixed effect model (FEM). Estimasi model tergantung pada asumsi yang kita buat mengenai intersep, koefisien kemiringan (slope), dan error term μ_{it} . Ada beberapa kemungkinan (Gujarati, 2010):

1. Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope (kemiringan) adalah konstan antar waktu (time) dan ruang (space) dan error term mencakup perbedaan

sepanjang waktu dan individu (ruang). Model ini biasa disebut pooled regression.

2. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi sepanjang individu.

Dalam literature, asumsi tersebut dikenal dengan nama *fixed effect (regression) model* (FEM). Terminologi fixed effect menunjukkan bahwa meskipun intersep bervariasi sepanjang individu, setiap intersep individu tersebut tidak bervariasi sepanjang waktu, yang disebut time invariant. Dapat juga dinyatakan bahwa berdasarkan model FEM, diasumsikan bahwa koefisien slope dari regresor tidak bervariasi antar individu maupun antar waktu. Bentuk model fixed effect adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk menyatakan perbedaan intersep, yaitu:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_{4i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \dots$$

(3.3)

Karena menggunakan variabel dummy untuk estimasi model fixed effect, model ini juga dikenal dengan nama least square dummy variable (LSDV) model.

3. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi sepanjang waktu dan individu.
4. Seluruh koefisien (intersep juga koefisien slope) bervariasi sepanjang individu.
5. intersep atau konstanta sebagaimana koefisien slope bervariasi antar individu dan waktu.

Penggunaan variabel dummy dapat menggunakan dummy tempat maupun dummy tahun. Dalam penelitian ini digunakan fixed effect model dengan dummy pada cross section (kabupaten/kota), dengan alasan bahwa masing-masing kabupaten/kota kemungkinan (diduga) mempunyai perbedaan karakteristik masing-masing provinsi baik dari segi demografi, persebaran penduduk, luas daerahnya, arah pembangunan provinsi dan sebagainya. Dalam penelitian ini tidak menggunakan random effect model (REM) karena jumlah observasi hanya 66 sedangkan untuk random effect model lebih sering digunakan untuk jumlah observasi yang banyak (lebih dari 1000 observasi) (Pratama, 2010).

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan model yang sah secara teoritis, maka model regresi harus memenuhi asumsi-asumsi klasik. Hal ini diperlukan agar hasil yang diperoleh dapat konsisten dan efisien secara teori. Menurut Gujarati (2010) ada 11 asumsi utama yang mendasari model regresi linier klasik dengan menggunakan ordinary least square (OLS) atau yang dikenal dengan asumsi klasik:

- a. Model regresi linier, artinya linier dalam parameter.
- b. Nilai X diasumsikan non-stokastik, artinya nilai X dianggap tetap dalam sampel yang berulang.
- c. Nilai rata-rata kesalahan μ_i adalah nol.
- d. Homokedastisitas, artinya varians kesalahan sama untuk setiap periode (Homo=sama, Skedastisitas=sebaran).
- e. Tidak ada autokorelasi antar kesalahan (antara μ_i dan μ_j tidak korelasi).

- f. Antara μ_i dan μ_j saling bebas.
- g. Jumlah observasi, n harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi (jumlah variabel independen).
- h. Adanya variabilitas dalam X_i , artinya nilai X_i harus beda.
- i. Model regresi telah dispesifikasi secara benar, dengan kata lain tidak ada bias (kesalahan) spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empirik.
- j. Tidak ada multikolinearitas yang sempurna antar variabel independen.
- k. Nilai kesalahan μ_i terdistribusi secara normal.

Proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik menggunakan langkah kerja yang sama dengan uji regresi. Ada empat uji asumsi klasik yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi tersebut yaitu deteksi multikolinearitas, deteksi heteroskedastisitas, deteksi autokorelasi dan deteksi normalitas.

3.4.4.1 Deteksi Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk menguji, apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent variable). Deteksi multikolinearitas terjadi hanya pada regresi ganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tinggi diantara variabel bebas dari suatu model regresi maka dikatakan terdapat masalah multikolinearitas dalam model tersebut. Masalah multikolinearitas mengakibatkan adanya kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan.

Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas menurut Gujarati (2010), dapat dideteksi dari gejala sebagai berikut:

1. Bila nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen.
2. Melakukan regresi parsial dengan cara:
 - a. Melakukan estimasi model awal dalam persamaan sehingga didapat nilai R^2 .
 - b. Melakukan auxiliary regression pada masing-masing variabel penjelas.
 - c. Bandingkan nilai R^2 dalam model persamaan awal dengan R^2 pada model persamaan regresi parsial, jika nilai regresi parsial lebih tinggi maka didalamnya terdapat multikolinearitas.
3. Melakukan korelasi antar variabel-variabel independen. Bila nilai korelasi independen lebih dari 0,8 maka terdapat multikolinearitas

3.4.4.2 Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi penyebaran data yang tidak sama atau tidak samanya variansi sehingga uji signifikansi tidak valid (Gujarati, 2010). Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian

yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati, 2010).

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heteroscedasticity* yang tersedia dalam program Eviews. Uji ini diterapkan pada hasil regresi dengan menggunakan prosedur equations dan metode OLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan *Obs*Rsquared*, secara khusus adalah nilai *probability* dari *Obs*Rsquared*. Dengan uji *White*, dibandingkan *Obs*Rsquared* dengan χ^2 (*chi-squared*) tabel. Jika nilai *Obs*Rsquared* lebih kecil dari pada χ^2 tabel maka tidak terdapat heteroskedastisitas pada model.

3.4.4.3 Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Masalah autokorelasi dapat diketahui dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*.

H0: $\rho = 0$

H1 : $\rho \neq 0$

Kriteria uji:

*Probability Obs *- Square* < taraf nyata (α), maka terima Ho

Probability Obs - Square* > taraf nyata (α), maka tolak Ho

Apabila nilai probabilitas *Obs*R-squared*-nya lebih besar dari taraf nyata tertentu (tolak H0), maka persamaan itu tidak mengalami autokorelasi. Bila nilai *Obs*R-*

squared-nya lebih kecil dari taraf nyata tertentu (terima H_0) maka persamaan itu mengalami autokorelasi.

Untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi dapat digunakan kaidah Newey-West atau heteroscedasticity-Autocorrelation Consistent (HAC) Standard Errors. Kaidah ini akan menghasilkan standar error yang bebas dari permasalahan heteroskedastisitas dan juga autokorelasi (Pratama, 2010).

Gujarati (2010) menyatakan bahwa walaupun nilai koefisien Durbin-Watson tidak berubah akan tetapi penyesuaian terhadap autokorelasi telah dilakukan dan persamaan dianggap telah bebas dari masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas.

3.4.5 Pengujian Statistik

Selain uji asumsi klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya (R^2), pengujian koefisien regresi secara serentak (uji F), dan pengujian koefisien regresi secara individual (uji t).

3.4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2010). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model.

Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas sangat terbatas.
- Nilai R^2 mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.

3.4.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan *level of significance* 5 persen, dengan rumus (Gujarati, 2010):

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(N-k)} \quad (3.8)$$

Dimana :

R^2 : koefisien determinasi

k : jumlah variabel independen

N : jumlah sampel

Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah :

$$H_0 : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0 \text{ (tidak ada pengaruh)} \quad (5.4)$$

$$H_1 : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \neq 0 \text{ (ada pengaruh)} \quad (5.5)$$

Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan nilai F hitung dengan F tabel menggunakan kriteria sebagai berikut :

- H0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H1 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
- H0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H1 diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

3.4.5.3 Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Uji t digunakan dalam pengujian statistik untuk melihat apakah variabel *independent* secara individu berpengaruh terhadap variabel *dependent*. Hipotesis dalam penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H0 : $b_i = 0$ (tidak ada pengaruh)

H1 : $b_i \neq 0$ (ada pengaruh)

$$T_{Hitung} = \frac{b_i}{Se(b_i)} \quad (3.9)$$

Dimana: $Se(b_i)$ = Standar error dari b

b_i = Koefisien regresi

Kesimpulan:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka tolak H0 terima H1, artinya Xi (variabel-variabel bebas pada persamaan) berarti berpengaruh nyata terhadap Y (variabel *dependent*/ variabel tidak bebas).

- Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka terima H_0 tolak H_1 , artinya X_i (variabel-variabel bebas pada persamaan) tidak berpengaruh nyata terhadap Y (variabel tidak bebas).